

PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Ramdanu Nugroho^a, Dirvi Surya Abbas^b

^{a,b}Universitas Muhammadiyah Tangerang

*ramdanunugroho@gmail.com^a; abbas.dirvi@gmail.com^b

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence about the tax burden and tax planning on earnings management in the financial statements of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2013-2015. The sample selection method used purposive sampling and obtained a sample of 32 companies. The data processing in this study uses panel data regression analysis using the Eviews 8 program. The results of this study show that deferred tax expense and tax planning have a positive effect on earnings management.

Keywords : Deferred tax expense, Tax planning.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan sample sebanyak 32 perusahaan. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan program *Eviews 8*. Hasil dari penelitian ini di dapatkan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Kata kunci : Beban pajak tangguhan, Perencanaan pajak.

1. Pendahuluan

Praktik manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgement*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Upaya untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Oleh

karena itu, perekayasa laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan (Astutik, 2016). Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang memiliki kewajiban pajak setiap tahun untuk membayar pajak penghasilan kepada pemerintah atas penghasilan kena pajak. Antara WP dan Pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan dalam hal pembayaran pajak. Bagi WP Badan, membayar pajak berarti akan mengurangi kemampuan ekonomis WP, oleh karena itu WP Badan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan Pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk

menyelenggarakan pemerintahan (Tundjung, 2015).

Itulah sebabnya informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*) yakni kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham dan *stakeholders* (Harnanto, 2013). Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *agent* dan *principal*, mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal* (Wiryadi, 2013).

Selain itu beban pajak tanggungan dapat menyebabkan adanya praktik manajemen laba. Beban pajak tanggungan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan oleh aturan pajak (Yuliati, 2011). Bagi suatu perusahaan, pajak yang ditanggung merupakan suatu elemen biaya yang mengurangi laba perusahaan, karena semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan berarti semakin kecil pula laba yang akan didapatkan perusahaan tersebut, sehingga timbul suatu kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak (Tundjung, 2015).

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik PPh maupun pajak-pajak lainnya beradam dalam posisi yang minimal,

sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suandy, 2008). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, termasuk Indonesia yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan. Untuk akuntansi pajak penghasilan, setiap perusahaan di Indonesia dalam membuat laporan keuangan diharuskan untuk mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan kreditor. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Sejumlah perbedaan antara PSAK dan aturan pajak menghasilkan dua jenis penghasilan, yaitu laba sebelum pajak (perhitungan laba akuntansi menurut PSAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan laba fiskal menurut aturan fiskal) (Hakim & Praptoyo, 2015).

Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba, sehingga bisa mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbang saldo akhir. Oleh karena itu, perlu penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal menimbulkan beban pajak tanggungan (Yuliati, 2011). Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak menjadi salah satu instrumen bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dan akan merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi (Herdawati, 2015).

Oleh karena itu, manajemen sering memanfaatkan peluang untuk memainkan angka laba dalam rangka mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan, salah satu contohnya manajemen berusaha meminimalkan pajak yang semestinya mereka bayar, dengan

cara meningkatkan akrual untuk menjadikan angka laba lebih rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Beban Pajak Tanggahan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba di Bursa Efek Indonesia”**.

2. Kajian Literatur

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agency. Teori agency ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pihak *principal* adalah pemegang saham atau investor sebagai pemilik perusahaan sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan (Anggitasari & Mutmainah, 2012).

Selain itu asumsi teori keagenan (*theory agency*) adalah bahwa masing-masing individu *economic rational man* dan kontrak antara *principal* dan *agent* tersebut dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* termotivasi untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalumeningkat atau kenaikan harga saham perusahaan sedangkan *agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kompensasi (Arista, 2013).

Oleh karena itu, *theory agency* dapat dijelaskan bahwa *theory* tersebut memiliki asumsi dari masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. *Agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi.

Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* sehingga

principal tidak mampu memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* dan dikenal dengan istilah *asymmetric information* (Harnanto, 2013).

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *agent* dan *principal*, mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal* (Wijaya, 2011). Sementara itu, asimetri informasi terjadi karena manajer mengetahui lebih banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham atau pemilik perusahaan, sehingga manajemen akan berusaha memanipulasi kinerja perusahaan yang dilaporkan untuk kepentingannya sendiri (Wibowo, 2016).

Oleh karena itu, asimetri informasi dapat dimengerti bahwa asimetri informasi tersebut terjadi karena pemilik dan manajemen yang memanipulasi kinerja perusahaan yang dilaporkan untuk kepentingan sendiri.

Faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan (Pradhita, 2010).

Laporan keuangan adalah suatu system yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2014). Sementara itu laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Lestari & Angelina, 2016).

Tujuan laporan keuangan

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2012). Karakteristik laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*Understandability*), relevan (*Relevance*), keandalan (*Reliability*), dan daya banding (*Comparability*) (IAI, 2009).

Terdapat dua versi laporan keuangan yang dihitung oleh perusahaan setiap tahunnya, yaitu laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum dan laporan keuangan yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan antara laba menurut akuntansi (*book income*) dan laba atau penghasilan menurut pajak (*taxable income*) dapat menunjukkan beda yang besar. Hal ini dikarenakan prinsip akuntansi yang berterima umum menyediakan manajer keleluasaan dalam pemilihan estimasi dan metode akuntansi dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang hanya memberikan lebih sedikit keleluasaan (Sumomba, 2010). Rekonsiliasi Fiskal terjadi karena perbedaan pengakuan dalam menyusun laporan keuangan antara komersial dengan perpajakan maka perlu dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal.

Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu (Waluyo, 2014). Selain itu, beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 2013).

Oleh karena itu, beban pajak tangguhan dapat dipahami bahwa jumlah beban pajak tangguhan terpulihkan (*recoverable*) sebagai akibat adanya perbedaan temporer

yang boleh dikurangkan dan sisanya dikompensasikan pada periode yang akan datang.

Tax planning merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari (Setiani, 2016). *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap *tax planning* ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Erly, 2011).

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dilakukan. Penghematan pajak adalah suatu usaha untuk menghemat hutang pajak dengan cara menahan diri untuk tidak mengkonsumsi barang-barang atau dengan cara mengurangi pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk pemberian kenikmatan (natura), karena biaya-biaya yang bersifat sebagai kenikmatan (natura) tidak dapat diakui sebagai biaya untuk tujuan fiskal, sehingga biaya-biaya tersebut akan dikoreksi sebagai penambahan pendapatan (Erly, 2011). Manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri adalah penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi, mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat (Astutik & Mildawati, 2016).

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan (*tax law*), dan

administrasi perpajakan (*tax administration*). Kebijakan perpajakan yakni alternative dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam system perpajakan, Undang-undang perpajakan (*tax law*), yakni kenyataan menunjukkan bahwa di manapun tidak ada undang - undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lain. Tidak jarang pula ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. Sedangkan administrasi perpajakan yakni tujuannya agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang masih belum efektif (Herdawati, 2015).

Beberapa tahapan dalam melakukan *tax planning* adalah pergeseran pajak (*tax shifting*), kapitalisasi, transformasi, penggelapan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Aditama & Purwaningsih, 2014).

Manajemen laba adalah proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi (Islahuzzaman, 2012). Selain itu manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008). Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgement*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan

tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Astutik & Mildawati, 2016). Upaya untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Oleh karena itu, perekayasaan laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan (Anggitasari & Mutmainah, 2012).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka-angka akuntansi yang dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah manajemen laba sebagai variabel tidak bebas dan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak sebagai variabel bebas berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Data sekunder tersebut diperoleh dengan metode pengamatan pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015.

Populasi adalah obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *puposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan.

Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2013-2015.
2. Perusahaan tidak *deleting* atau keluar dari BEI selama periode pengamatan.
3. Perusahaan manufaktur yang mengalami keuntungan berturut – turut selama periode tahun 2013- 2015.
4. Perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang Rupiah.
5. Laporan keuangan perusahaan manufaktur yang memiliki beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara lengkap selama periode tahun 2013– 2015.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu, salah satu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengambil dokumen dari suatu kejadian atau peristiwa, baik berupa tulisan, gambar atau rekaman yang disimpan (Indriantoro & Bambang, 2011). Data berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 - 2015 yang telah ditentukan sebagai sampel diambil dari BEI.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik kuantitatif uji kualitas data yaitu metode estimasi model regresi yaitu Metode Common Effect, Metode Fixed Effect, dan Metode Rendom Effect. Model Regresi Data Panel yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Lagrange Multiplier. Uji Asumsi Klasik antara lain Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolonieritas. Setelah itu, melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji pengaruh parsial(uji T)

dan koefisien determinasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Data Panel

Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

$$DACCit = C + BPT + PP$$

$$= 5.904345 + 0.057568 (\text{LOG BPT}) + 0.940758 (\text{LOG PP})$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 5.904345 hal ini menunjukkan jika variabel independen menyebabkan kenaikan DACC sebesar 5.904345

b. Koefisien Regresi Variabel Beban Pajak Tangguhan

Nilai koefisien regresi variabel bebean pajak tangguhan (BPT) adalah 0.057568, hal ini menunjukkan jika setiap kenaikan BPT sebesar 1 satuan maka akan menaikkan DACC 0.057568

c. Koefisien Regresi Variabel Pajak Perencanaan

Nilai koefisien regresi variabel pajak perencanaan (PP) sebesar 0.940758 hal ini menunjukkan jika setiap kenaikan PP sebesar 1 satuan maka akan menaikkan DACC sebesar 0.940758

Uji Hipotesis

Uji F

Penelitian ini menggunakan nilai statistik F untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis pada uji F adalah sebagai berikut :

- H_0 : Model regresi yang diestimasi tidak layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh beban pajak tangguhan dan pajak perencanaan terhadap manajemen laba.
- H_1 : Model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh beban pajak tangguhan dan pajak perencanaan terhadap manajemen laba.

Ketentuan : nilai Prob. (F-statistic) < α (0,05), maka H_0 ditolak.

Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh beban pajak tangguhan dan pajak perencanaan terhadap manajemen laba. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

- a. Variabel BPT memiliki nilai t-statistik sebesar 2,777123 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0072 < dari tingkat signifikansi (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa BPT berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
- b. Variabel PP memiliki nilai t-statistik sebesar 10,45281 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 < dari tingkat signifikansi (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa PP berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan persen variasi dalam variabel dependen (Y) yang dijelaskan disebabkan oleh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_k). R^2 merupakan koefisien korelasi kuadrat dan tidak dapat bernilai negatif. Persamaan regresi linier berganda semakin lemah apabila nilai koefisien determinasi R^2 semakin kecil (mendekati 0), sebaliknya nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan semakin kuat (Nachrowi, 2006).

Berdasarkan besarnya adjusted R^2 sebesar 0,958790 menandakan bahwa variasi manajemen laba mampu dijelaskan secara serentak atau dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini sebesar 97,31% sedangkan sisanya 2,69% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

1. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba
Berdasarkan hasil pengujian dengan uji t (uji signifikan parsial) menunjukkan nilai t-statistic sebesar 2,777123 dan nilai probabilitas sebesar 0,0072 yang artinya tingkat signifikansi $p\text{-value} < \alpha = 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yuliati, 2011) menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk menghindari kerugian.
2. Pengaruh Beban Pajak Perencanaan terhadap manajemen laba
Berdasarkan hasil pengujian dengan uji t (uji signifikan parsial) menunjukkan nilai t-statistic sebesar 10,45281 dan nilai

probabilitas sebesar 0,0000 yang artinya tingkat signifikansi $p\text{-value} < \alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak perencanaan berpengaruh terhadap manajemen laba dengan nilai parameter positif. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ulfa, 2013) menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis data yang dilakukan serta pembahasan hasil yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu beban pajak tangguhan yang diukur menggunakan ratio antara beban pajak tangguhan dengan total aset berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin besar beban pajak tangguhan maka dapat mengurangi laba perusahaan sehingga mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar karena banyak melakukan koreksi antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Perencanaan pajak yang diukur dengan menggunakan ratio antara laba bersih (net income) dengan laba sebelum pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu cara perencanaan pajak dengan mengatur beberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya manajemen laba. Implikasi beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, yaitu:

1. Bagi pemerintah, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memahami manajemen laba yang dilaporkan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan, mengingat laba yang dilaporkan belum tentu sesuai dengan laba perusahaan yang sebenarnya.
2. Bagi manajemen, hendaknya dapat menyikapi secara bijaksana manajemen laba secara efisien yaitu memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka sendiri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan semua pihak dalam kontrak.

Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya,

maka beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memakai alternatif lain dalam kerangka pemikiran.
2. Penelitian selanjutnya juga perlu mempertimbangkan sampel yang lebih besar, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.
3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan meneliti perusahaan yang terdaftar di BEI dalam sektor lain yang sejenis.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain diluar variabel yang dalam penelitian ini serta diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan data time series yang terbaru sehingga hasil penelitian dapat semakin akurat.

Daftar Pustaka

- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Modus Vol.26 (1): 33-50*.
- Amanda, F., & Febrianti, M. (2008). Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, dan Basis Akrua Terhadap Manajemen Laba. *Universitas Tarumanegara*.
- Anasta, L. (2013). Analisis Pengaruh Deffered Tax Asset, Deffered Tax Liabilities, dan Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Tekun, IV*.
- Anggitasari, N., & Mutmainah, S. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Struktur Good Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Vol. 11*, 1-15.
- Arista, N. H. (2013). Pengaruh Aktiva Pajak tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. XI*.
- Astutik, R. E., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5*, 10.
- Astutik, R. E., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol. 5, No. 3*.